

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan tingkah laku lainnya dalam masyarakat tempat mereka hidup. Menurut *webster's new world dictionary* (1962), pendidikan adalah proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, karakter, dan seterusnya.¹

Dalam proses pendidikan tersebut peserta didik diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam keperluan hidup di dunia. Selain itu peserta didik juga diberikan bekal nilai-nilai akhlak, membina hati dan ruhani sehingga melahirkan generasi penerus (*out put*) yang memiliki kepribadian utuh (*integrated personality*) sehingga dapat memakmurkan dan memuliakan kehidupan material dan spiritual, keluarga dan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam serta menjadi hamba Allah yang baik bahagia di dunia dan akhirat.² Betapa pentingnya pendidikan sehingga peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

¹Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Albeta; 2007), hal.1

²Basuki dan Miftahul Ulum, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Stain Po Press, 2007), hal.18

Peranan lembaga pendidikan dalam rangka mengantarkan peserta didik untuk meningkatkan perilaku keagamaan, salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan manajemen pengelolaan pendidikan Islam dengan baik, arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkan yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Dengan demikian, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.³

Tidak luput dari itu semua bangsa ini berkembang dan besar, salah satunya, karena jasa pendidikan. Hak semua negara menentukan nasib diri sendiri dilaksanakan dengan jalan menyusun dan melaksanakan sistem-sistem kehidupan bernegara-kebangsaan. Dengan demikian, setiap negara kebangsaan membangun sistem politik nasional, sistem ekonomi nasional, sistem hukum nasional, sistem pendidikan nasional, dan sebagainya.⁴ Pendidikan merupakan indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa. Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.⁵

Sumber daya manusia (SDM) bisa di bentuk melalui pendidikan.

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan

³Sulistiyorini, *Manajemen pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras Kompleks Polri Gowok Blok D 2 No. 186) hal 1

⁴Redja Mudyahardjo, *Pengantar pendidikan* (Jakarta; PT raja grafindo persada, 2006) hal.191

⁵UUD 1945 beserta amandemennya (pasal 31 ayat 2). yaitu Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi.⁶

Madrasah sebagai lembaga pendidikan dalam bentuk pendidikan formal sudah dikenal sejak awal abad ke 11 atau 12 M, yaitu sejak dikenal adanya madrasah Nidzamiyah yang didirikan di Baghdad oleh Nizam Al-Mulk⁷, Pendirian madrasah ini telah memperkaya khasanah lembaga pendidikan di lingkungan masyarakat Islam, karena pada masa sebelumnya masyarakat Islam hanya mengenal pendidikan tradisional yang diselenggarakan di masjid-masjid dan *dar al-khuttab*. Di Timur Tengah, institusi madrasah berkembang untuk menyelenggarakan pendidikan keislaman tingkat lanjut (*Advance/tinggi*), yaitu melayani mereka yang masih haus ilmu sesudah sekian lama menimbanya dengan belajar di masjid-masjid dan/atau *dar Al-khuttab*. Dengan demikian, pertumbuhan madrasah sepenuhnya merupakan perkembangan lanjut dan alamiah dari dinamika internal yang tumbuh dari dalam masyarakat Islam sendiri.⁸

Dalam prinsipnya, madrasah merupakan pendidikan yang sama dengan pendidikan umum, tetapi lebih menekankan pendidikan Islam secara

⁶UUD No 9 2009

⁷Beliau adalah seorang menteri terkemuka, diantara master-master lainnya, misalnya Qiwam Ad-Din, Abu Ali Al Hasan bin Ali bin Ishaq Ath-Thusi. Dia adalah orang yang cerdas, penguasa, pakar, religi, terhormat, dan pemimpin majlis ulama qira'ah dan ulama fikih. Dia membangun sekolah terkenal di Baghdad, Naisabur, dan Thus. Dia sangat menjunjung tinggi ilmu. Dia sangat dekat dengan para siswa, mengimlakkan (mendiktekan) hadits dan mempunyai reputasi luar biasa. <http://cara-global.blogspot.com/2010/12/nizham-al-mulk.html>

⁸Abdul Racman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi* (Jakarta; PT Raja grafindo persada 2004) hal.11

intensif dan mendalam, Perbedaan prinsip antara pendidikan umum dan pendidikan Islam adalah bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem pendidikan yang baku, melainkan hanya terdapat nilai-nilai moral dan etis yang seharusnya mewarnai sistem pendidikan tersebut. Berbagai komponen yang terdapat dalam suatu sistem pendidikan tersebut, seperti dasar pendidikan, tujuan, kurikulum, metode, pola hubungan guru murid, dan lain sebagainya.⁹

Sistem yang demikian bisa dibuat dengan menggunakan manajemen Pendidikan Islam melalui konsep, strategi dan aplikasi. Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan non manusia dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien.

Sebagai kelanjutan dari terbitnya UU Nomor 20/2003, telah terbit juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai delapan standar¹⁰, yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan Pendidikan
8. Standar Penilaian Pendidikan

⁹Sulistiyorini, *Manajemen pendidikan Islam, Konsep Strategi Dan Aplikasi*. (Yogyakarta; TERAS komplek polri gowok blok D 2 No.186,2009) hal.22

¹⁰UU Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Penetapan standar-standar di atas bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar tersebut juga memiliki fungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pencapaian standar tersebut telah dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang merupakan badan mandiri/independen yang secara struktural bertanggung jawab kepada Mendiknas.¹¹

Dalam pendidikan di Indonesia pemerintah sudah membuat standar mutu pendidikan dalam permendiknas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disertai dengan munculnya kebijakan-kebijakan lainnya seperti PP Nomor 19/2005, Permendiknas Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006 saat ini membawa pemikiran baru dalam pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia yang mengarah pada berkembangnya keinginan untuk melaksanakan otonomi pengelolaan pendidikan. Otonomi pengelolaan pendidikan ini diharapkan akan mendorong terciptanya peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang bermuara pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan pada tataran paling bawah (*at the bottom*) yaitu sekolah atau satuan pendidikan.

¹¹<http://blujer.blogspot.com/2012/03/badan-standar-nasional-pendidikan-bsnp.html>

Penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dewasa ini sebagai bukti bahwa sekolah diharapkan menjadi *centre of excellence* dari inovasi implementasi kebijakan pendidikan saat ini yang bukan hanya harus dikaji sebagai wacana dalam pengelolaan pendidikan namun sebaiknya dipertimbangkan sebagai langkah strategis ke arah peningkatan mutu pendidikan. Terbitnya Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 memunculkan kebijakan baru dalam pengembangan kurikulum di tanah air. Pada pasal 38 ayat 1 UU tersebut dinyatakan bahwa Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Dinyatakan pula pada ayat 2 bahwa “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

Menurut pengamatan peneliti, Madrasah yang berhasil mengaplikasikan manajemen berbasis mutu sangat banyak sekali diantaranya Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Plus Dagangan Madiun. Berdasarkan studi awal, lembaga pendidikan Islam ditingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) ini menanamkan prinsip perilaku dan nilai-nilai Islam dan memiliki standar pengelolaan manajemen mutu yang baik. Hal ini dibuktikan dengan prestasi akademiknya, yang unggul dalam

manajemen mutunya, madrasah ini juga memperoleh peminat dan kepercayaan masyarakat yang tinggi untuk menyekolahkan putra-putrinya, madrasah juga dapat bersaing dengan lembaga pendidikan umum. Hal ini menjadi suatu ketertarikan peneliti untuk mengetahui lebih dalam apakah memang benar Madrasah Ibtidaiyah Plus Al-Islam Dagangan Kabupaten Madiun benar-benar menerapkan sitem manajemen mutu yang di standarkan pada permendiknas ataukah madrasah sudah memiliki model pendidikan sendiri. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut.

Masalah ini penting diteliti berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: (1) selama ini lembaga pendidikan Islam, termasuk madrasah ibtidaiyah bercitra jelek yaitu lembaga pendidikan kelas dua setelah kelas umum, (2) perlunya madrasah model yang dijadikan pijakan/kiblat madrasah/lembaga pendidikan Islam lainnya, terhitung dengan pengelolaan yang berkualitas unggul, (3) perlunya pembenahan terus menerus dalam pengembangan kualitas manajemennya untuk menghadapi persaingan yang begitu ketat dari dalam negeri maupun luar negeri untuk era globalisasi sekarang ini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul: **MADRASAH PLUS PERSPEKTIF MANAJEMEN MUTU (Studi Di Madrasah Ibtidaiyah Plus Al-Islam Dagangan Kabupaten Madiun).**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari penyimpangan dari pokok permasalahan dan di karenakan keterbatasan waktu, maka masalah penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini di batasi:

1. Manajemen sumberdaya manusia, manajemen kesiswaan, manajemen pembiayaan dan pendanaan Madrasah Ibtidaiyah Plus Al-Islam Dagangan
2. Hasil manajemen mutu Madrasah Ibtidaiyah Plus Al-Islam Dagangan

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Mutu Madrasah Ibtidaiyah Plus Al-Islam Dagangan Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana Hasil Dari Manajemen Mutu Madrasah Ibtidaiyah Plus Al-Islam Dagangan Kabupaten Madiun?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui Bagaimana Manajemen Mutu Madrasah Ibtidaiyah Plus Al-Islam Dagangan Kabupaten Madiun.
- 2 Untuk Mengetahui Bagaimana Hasil Dari Manajemen Mutu Madrasah Ibtidaiyah Plus Al-Islam Dagangan Kabupaten Madiun

E. Manfaat Penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktis adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. **Secara Teoritik:** Menambah khazanah ilmu pengetahuan yang akan berguna bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, Penelitian menemukan model Manajemen Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Plus Dagangan Kabupaten Madiun.
2. **Secara Praktis:** Memberikan kontribusi terhadap guru sebagai bahan pengetahuan dalam meningkatkan kualitas menejemen sesuai dengan visi dan misi sekolah.
 - a. Bagi sekolah MI Al-Islam merupakan bentuk evaluasi bagi sekolah.
 - b. Bagi guru merupakan suatu pengetahuan baru dalam menambah khasanah pengetahuan.
 - c. Bagi Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kab.Madiun sebagai perbandingan antara kualitas mutu dan evaluasi bersama dalam pengelolaan manajemen mutu pendidikan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini maka penulis menggunakan pembahasan sebagai berikut :

Bab Satu Pendahuluan, bab ini berfungsi untuk memparkan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah,

fokus dan batasan penelitian, Rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua Berisi landasan teori dan atau telaah pustaka bab ini berfungsi untuk menegakkan kerangka awal teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian Manajemen Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Plus Dagangan Kabupaten Madiun.

Bab Tiga tentang metode penelitian yang meliputi: prosedur penelitian, populasi.

Bab Empat Berupa latar belakang obyek, penyajian data, Analisis data dan pembahasan hasil penelitian tentang Manajemen Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Plus Dagangan Kabupaten Madiun.

Bab Lima Penutup bab ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi pembaca yang mengambil intisari dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

